

Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusa
t Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pus
at Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pu
sat Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi P
usat Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi
Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Informas
i Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Informa
si Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Inform
asi Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi Infor
masi Pu
rmasi P
ormasi
formas
nforma
Informasi usat Komisi Informasi usat Komisi
i Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi
si Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Komisi
isi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat Ko
misi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat K
omisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat
Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusa
t Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pus
at Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pu

**SEKRETARIAT KOMISI
INFORMASI PUSAT**
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2017
AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

Drs. Hendra Purnama, M.Si
NIP 19581020 1985023 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	30
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

Drs. Hendra Purnama, M.Si
NIP 19581020 1985003 1 003

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.784.330,- atau mencapai 0,0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp15.321.431.740,- atau mencapai 85,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.023.154.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.164.573.088,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp144.550.783,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp 953.091.055,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 66.931.250,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 243.009,- dan Rp1.164.330.079,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp15.457.013.891,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp15.457.013.891,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.400.098,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp15.452.613.793,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp1.304.939.462,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp15.452.613.793,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 2.643.000,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.314.647.410,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.164.330.079,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	6.784.330	#DIV/0!	5.617.867
JUMLAH PENDAPATAN		-	6.784.330	#DIV/0!	5.617.867
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	3.830.484.000	3.192.133.118	83,33	3.187.400.976
Belanja Barang	B.4	13.894.870.000	11.834.572.597	85,17	12.980.413.566
Belanja Modal	B.5	297.800.000	294.726.025	98,97	79.228.941
Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		18.023.154.000	15.321.431.740	85,01	16.247.043.483

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	1.545.228	2.643.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.3	143.005.555	78.746.373
Jumlah Aset Lancar		144.550.783	81.389.373
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	5.571.654.036	4.225.156.261
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	248.112.400	248.112.400
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(4.866.675.381)	(3.433.404.705)
Jumlah Aset Tetap		953.091.055	1.039.863.956
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	197.150.000	149.650.000
Aset Lain-Lain	C.8	-	1.471.469.250
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(130.218.750)	(1.279.652.375)
Jumlah Aset Lainnya		66.931.250	341.466.875
JUMLAH ASET		1.164.573.088	1.462.720.204
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	243.009	157.780.742
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		243.009	157.780.742
JUMLAH KEWAJIBAN		243.009	157.780.742
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	1.164.330.079	1.304.939.462
JUMLAH EKUITAS		1.164.330.079	1.304.939.462
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.164.573.088	1.462.720.204

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.037.524.576	3.338.425.299
Beban Persediaan	D.3	406.082.386	348.648.091
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.743.191.251	7.841.393.272
Beban Pemeliharaan	D.5	224.899.447	366.924.823
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.391.521.680	4.492.339.527
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	653.794.551	820.479.952
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		15.457.013.891	17.208.210.964
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15.457.013.891)	(17.208.210.964)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.8	3.800.000	2.000.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(2.240.000)	(27.875.543)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(1.016.056)	(4.201.045)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.856.154	1.071.181
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.400.098	(29.005.407)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(15.452.613.793)	(17.237.216.371)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(15.452.613.793)	(17.237.216.371)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	1.304.939.462	2.359.365.235
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(15.452.613.793)	(17.237.216.371)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.643.000)	(58.635.018)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	(60.234.018)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	(2.643.000)	1.599.000
JUMLAH		(2.643.000)	(58.635.018)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	15.314.647.410	16.241.425.616
EKUITAS AKHIR	E.5	1.164.330.079	1.304.939.462

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi publik di badan publik tingkat pusat. Organisasi dan tata kerja entitas diatur oleh Undang undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/037/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Entitas berkedudukan di Graha PPI Lantai 5 Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas dan fungsi dalam Memutuskan sengketa informasi publik serta memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian dan Lembaga yang berstatus Badan Publik dapat membuka informasi publiknya kepada Masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut guna mendukung pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Sekretariat Informasi Publik berkomitmen dengan visi “**mewujudkan Keterbukaan informasi publik di badan publik, agar tercapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga yang berkelanjutan.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID).
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kominfo yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Sekretariat Komisi Informasi Pusat* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah sebesar Rp. 579.545.000,- dan adanya Tambahan Belanja Pegawai (Tunjin) untuk penggantian Pembayaran atas kenaikan Tunjangan Kinerja pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Tahun 2016 yang dibayarkan menggunakan Anggaran Tahun 2017. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.622.358.000	3.830.484.000
Belanja Barang	14.474.415.000	13.894.870.000
Belanja Modal	297.800.000	297.800.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	18.394.573.000	18.023.154.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp6.784.330*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 6.784.330 atau mencapai 0 persen karena tidak ada anggaran pendapatan. Pendapatan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri dari Pendapatan Jasa dan

Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	6.784.330	-
Jumlah	-	6.784.330	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan lain-lain TA 2017 mengalami kenaikan 20,76 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	6.784.330	5.617.867	20,76
Jumlah	6.784.330	5.617.867	20,76

*Realisasi
Belanja Negara
Rp15.321.431.740
40*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp15.321.431.740,- atau 85,01% dari anggaran belanja sebesar Rp18.023.154.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.830.484.000	3.192.133.118	83,33
Belanja Barang	13.894.870.000	11.834.572.597	85,17
Belanja Modal	297.800.000	294.726.025	98,97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	18.023.154.000	15.321.431.740	85,01
Pengembalian	-	-	-

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami Penurunan sebesar 5,70% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak tercapainya realisasi anggaran belanja keperluan kantor dan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin disebabkan adanya Pegawai Non PNS yang mengundurkan diri serta adanya rencana Penghapusan Kendaraan dinas Komisioner.
2. Adanya Pengadaan Belanja Modal berupa Pengadaan Arsip berbasis Aplikasi dan Pengadaan AC Split dan AC Floor.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.192.133.118	3.187.400.976	0,15
Belanja Barang	11.834.572.597	12.980.413.566	(8,83)
Belanja Modal	294.726.025	79.228.941	271,99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	15.321.431.740	16.247.043.483	(5,70)

*Belanja
Pegawai
Rp3.192.133.1
18*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.192.133.118,- dan Rp3.187.400.976,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami Kenaikan sebesar 0,15 persen dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya tambahan Belanja Pegawai terkait dengan kenaikan Tunjangan Kinerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan menggunakan Anggaran Tahun 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.080.226.221	1.360.630.045	(20,61)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	1.142.490.000	1.149.540.000	(0,61)
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & B Transito	1.036.950.122	721.280.847	43,77
Jumlah Belanja Kotor	3.259.666.343	3.231.450.892	0,87
Pengembalian Belanja Pegawai	(67.533.225)	(44.049.916)	53,31
Jumlah Belanja	3.192.133.118	3.187.400.976	0,15

*Belanja
Barang
Rp11.834.572.5
97*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.834.572.597,- dan Rp12.980.413.566,-. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan 8,90% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja perjalanan dinas dan belanja bahan keperluan perkantoran tahun 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.420.114.770	2.488.156.322	(2,73)
Belanja Barang Non Operasional	1.234.948.750	1.975.111.892	(37,47)
Belanja Jasa	3.092.602.150	3.388.379.146	(8,73)
Belanja Pemeliharaan	234.105.447	372.336.173	(37,13)
Belanja Barang Persediaan	461.279.800	274.918.840	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.088.218.612	4.492.339.527	(9,00)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	303.303.068	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	11.834.572.597	12.991.241.900	(8,90)
Pengembalian Belanja	-	(10.828.334)	
Jumlah Belanja	11.834.572.597	12.980.413.566	(8,83)

*Belanja Modal
Rp 294.726.025*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 294.726.025,- dan Rp 79.228.941,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami Kenaikan sebesar 271,99% dibandingkan TA 2016 disebabkan karena adanya pengadaan belanja Modal dan Peralatan yang sangat mendesak di Tahun 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247.226.025	79.228.941	212,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	47.500.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	294.726.025	79.228.941	271,99
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	294.726.025	79.228.941	271,99

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 dan 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rekening 032901002931306	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp
1.545.228*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 1.545.228,- dan Rp 2.643.000,-. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Pot. Kehadiran Tunkin bln Des 2017	1.545.228	-
Pembayaran Internet	-	2.643.000
	-	-
Jumlah	1.545.228	2.643.000

*Persediaan Rp
143.005.555*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 143.005.555,- dan Rp78.746.373,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	142.747.555	78.494.373
Barang untuk Pemeliharaan	258.000	252.000
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	143.005.555	78.746.373

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan
Mesin
Rp5.571.654.036*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp5.571.654.036,- dan Rp4.225.156.261,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	4.225.156.261
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.594.726.025
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(248.228.250)
Saldo per 31 Desember 2017	5.571.654.036
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(4.866.675.381)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	704.978.655

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian 1 bh Lemari Arsip dorong (Mobile File) senilai Rp. 32.000.000,-
- b. Pembelian 2 unit AC Floor Standing 5 Pk senilai Rp. 46.000.000,-
- c. Pembelian 4 unit AC Split 2 Pk senilai Rp. 28.400.000,-
- d. Pembelian 1 bh Kamera Digital senilai Rp. 7.897.000,-
- e. Pembelian 1 bh Tripod Kamera senilai Rp. 1.874.500,-
- f. Pembelian 1 bh Paper Tape Scanner senilai Rp. 3.209.745,-
- g. Pembelian 5 unit PC (Personal Computer) senilai Rp. 60.292.150,-
- h. Pembelian 5 bh Notebook senilai Rp. 56.792.760,-
- i. Pembelian 1 bh Printer senilai Rp. 4.889.720,-
- j. Pembelian 1 bh Scanner senilai Rp. 5.870.150,-
- k. Koreksi kembali atas penghapusan mobil sedan sebanyak 7 unit senilai Rp. 1.347.500.000,-

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan 1 unit AC Split senilai Rp. 5.600.000,- 1 buah Mesin Foto

Copy Elektronik senilai Rp. 49.320.000,- 1 buah filling Cabinet Kayu senilai Rp 19.854.250,- 2 buah Handy Cam senilai Rp. 23.917.500,- 2 buah Digital Audio senilai Rp. 2.000.000,- 1 buah Camera Gigital senilai Rp. 4.317.000,- 4 buah PC unit senilai Rp. 38.329.000,- 8 buah Note Book senilai Rp. 94.815.500,- dan 2 buah Printer senilai Rp. 10.075.000,-. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp248.112.400
0*

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp248.112.400 dan Rp248.112.400. Aset tetap tersebut berupa barang dalam renovasi dan Monografi/buku. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	248.112.400
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2017	248.112.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	248.112.400

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Aset Tetap
Rp4.866.675.381

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp4.866.675.381,- dan Rp3.433.404.705,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.571.654.036	4.866.675.381	704.978.655
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	248.112.400	0	248.112.400
Akumulasi Penyusutan		5.819.766.436	4.866.675.381	953.091.055

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp197.150.000

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp197.150.000 dan Rp149.650.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	149.650.000
Mutasi tambah:	47.500.000
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	197.150.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(130.218.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	66.931.250

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2017

Uraian	Nilai Perolehan
Software Computer	197.150.000
	0
Jumlah	197.150.000

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp0 dan Rp1.471.469.250,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	1.471.469.250
Mutasi tambah:	
- Penghentian penggunaan	(123.969.250)
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(1.347.500.000)
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi 7 Unit kendaraan dinas roda 4 (Sedan) yang sudah dalam

kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp1.347.500.000.

- 16 buah Alat Kantor dan Rumah Tangga Serta Peralatan Computer senilai Rp. 123.969.250.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp130.218.750.*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp130.218.750,- dan Rp1.279.652.375,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	197.150.000	130.218.750	66.931.250
Jumlah	197.150.000	130.218.750	66.931.250
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	197.150.000	130.218.750	66.931.250

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp243.009,-

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp243.009,- dan Rp157.780.742,-. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah kekurangan Gaji terkait dengan kenaikan Pangkat Pengabdian Sdr. Daulat Siregar, dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Kekurangan Belanja Pegawai Bulan Oktober 2017	243.009	a/n Sdr. Daulat Siregar
	-	
	-	
Total	243.009	

Ekuitas Rp1.164.330.079

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.164.330.079 dan Rp1.304.939.462. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Rp 0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat Pendapatan Jasa maupun Pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional Tahun 2017 maupun Tahun 2016.

Beban

D.2 Beban Pegawai

Pegawai

Rp3.037.524.576.

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.037.524.576 dan Rp3.338.425.229. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Penurunan Beban Pegawai sebesar 9 % disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang

memasuki pensiun pada Tahun 2017.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	788.176.496	957.639.945	(18)
Beban Tunjangan-tunjangan	292.292.734	400.708.100	(27)
Beban Honorarium dan Vakasi	1.142.490.000	1.149.540.000	(1)
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan)	814.565.346	830.537.254	(2)
Jumlah	3.037.524.576	3.338.425.299	(9)

*Beban
Persediaan
Rp406.082.386.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp406.082.386,- dan Rp348.648.091,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	406.082.386	348.648.090	16
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	406.082.386	348.648.090	16

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp6.743.191.251*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.743.191.251,- dan Rp7.841.393.272,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	2.201.381.770	2.249.200.083	(2,13)
Beban Jasa Pos dan Giro	5.623.000	22.967.905	(75,52)
Beban Honor	504.670.000	522.480.000	(3,41)
Beban Barang	476.349.800	1.378.009.917	(65,43)
Beban Bahan	467.038.950	279.781.975	66,93
Beban Langganan dan daya	121.830.761	141.688.392	(14,02)
Beban Sewa	2.463.096.970	2.458.970.000	0,17
Beban Jasa Konsultan	0	20.680.000	-
Beban Jasa Profesi	403.250.000	705.300.000	(42,83)
Beban Jasa Lainnya	99.950.000	62.315.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-
Jumlah	6.743.191.251	7.841.393.272	(14,01)

Beban Pemeliharaan Rp224.899.447.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp224.899.447,- dan Rp366.924.823,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.899.447	366.924.823	(38,71)
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Jumlah	224.899.447	366.924.823	(38,71)

Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah

Dinas masing-masing sebesar Rp4.391.521.680,- dan
Rp4.391.521. Rp4.492.339.527,-. Beban tersebut merupakan beban
680 yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.468.409.346	2.439.642.127	-39,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.910.000	138.035.000	2,08
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231.920.000	77.750.000	198,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.246.979.266	1.836.912.400	22,32
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	303.303.068	0	#DIV/0!
Jumlah	4.391.521.680	4.492.339.527	-2,24

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp653.794.5
51

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp653.794.551,- dan Rp820.479.952,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 dan 2016*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	523.698.926	684.942.977	(24)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	96.995.625	98.124.475	(1)
Jumlah Penyusutan	620.694.551	783.067.452	(21)
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	33.100.000	37.412.500	(12)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	33.100.000	37.412.500	(12)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	653.794.551	820.479.952	(20)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp4.400.098

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.800.000	2.000.000	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(2.240.000)	(27.875.543)	(91,96)
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	3.856.154	1.071.181	259,99
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.016.056)	(4.201.045)	(75,81)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.400.098	(29.005.407)	(115,17)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar
Biasa Rp 0*

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp1.304.939.462*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.939.462,- dan Rp2.359.365.235,-.

*Defisit LO
Rp15.452.613.793*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp15.452.613.793,- dan Rp17.237.216.371,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat

penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp60.234.018,-.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap non Revaluasi	-
Aset lainnya non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Lain
Rp2.643.000,-
-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.643.000,- dan Rp1.599.000,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	2.643.000
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	2.643.000

Transaksi
Antar Entitas
Rp15.314.647.410

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.314.647.410,- dan Rp16.241.425.616,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(6.784.330)
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.321.431.740
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	15.314.647.410

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar (Rp6.784.330,-) sedangkan DKEL sebesar Rp15.321.431.740,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0 .

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0-. dari yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp1.164.330.079

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.164.330.079,- dan Rp1.304.939.462,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Sehubungan Telah Memasuki Masa Pensiun Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat maka diputuskan perlu dilakukan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1336 TAHUN 2017 tentang pnggantian Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juli 2017 telah dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran ,

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : M. Samuah

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Selamatta Sembiring

- Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1771 TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 11 September 2017 telah dilakukan penggantian Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

Semula :

Plt. Sekretaris K I P : Drs. Selamatta Sembiring, M.Si

Menjadi :

Sekretaris K I P : Drs. Hendra Purnama M.Si

Sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi Pejabat dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka diputuskan perlu dilakukan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1805 TAHUN 2017 tentang penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 20 September 2017 telah dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran,

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Selamatta Sembiring

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Hendra Purnama

- Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1897 TAHUN 2017 tentang penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen,

Semula :

Pejabat Pembuat Komitmen : Daulat Siregar

Menjadi :

Pejabat Pembuat Komitmen : Hendra Purnama

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 677382

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 DKI JAKARTA
 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl. Cetak 21/02/2018 10:21 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	1,545,228	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	142,747,555	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	258,000	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,571,654,036	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	203,139,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	44,973,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,866,675,381
0.0	162151	Software	197,150,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	130,218,750
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	243,009
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,321,431,740
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,784,330	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,304,939,462
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,643,000	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,800,000
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,984,330
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	871,824
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	788,166,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,396	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61,622,890	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,009,464	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	67,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	8,450,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,140,900	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	35,775,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	84,714,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17,440,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,142,490,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	882,098,571	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	67,533,225
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,201,381,770	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 677382

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 DKI JAKARTA
 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl. Cetak 21/02/2018 10:21 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,623,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	182,920,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	30,190,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	467,038,950	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	321,750,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	446,159,800	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	51,629,166	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70,201,595	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,463,096,970	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	403,250,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	99,950,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224,545,447	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,468,409,346	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140,910,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231,920,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,246,979,266	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	303,303,068	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	523,698,926	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	33,100,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	96,995,625	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	406,082,386	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	354,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,016,056	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	2,240,000	0
JUMLAH			21,698,697,721	21,698,697,721

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 677382
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 21/02/18 10:17
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 21/02/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,037,524,576	3,338,425,299	(300,900,723)	(9.013)
Beban Persediaan	406,082,386	348,648,091	57,434,295	16.473
Beban Barang dan Jasa	6,743,191,251	7,841,393,272	(1,098,202,021)	(14.005)
Beban Pemeliharaan	224,899,447	366,924,823	(142,025,376)	(38.707)
Beban Perjalanan Dinas	4,391,521,680	4,492,339,527	(100,817,847)	(2.244)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 677382
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 21/02/18 10:17
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 21/02/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	653,794,551	820,479,952	(166,685,401)	(20.316)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,457,013,891	17,208,210,964	(1,751,197,073)	(10.177)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,457,013,891)	(17,208,210,964)	1,751,197,073	(10.177)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,560,000	(25,875,543)	27,435,543	(106.029)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,800,000	2,000,000	1,800,000	90
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,240,000	27,875,543	(25,635,543)	(91.964)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,840,098	(3,129,864)	5,969,962	(190.742)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,856,154	1,071,181	2,784,973	259.991
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,016,056	4,201,045	(3,184,989)	(75.814)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,400,098	(29,005,407)	33,405,505	(115.17)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15,452,613,793)	(17,237,216,371)	1,784,602,578	(10.353)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,452,613,793)	(17,237,216,371)	1,784,602,578	(10.353)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 677382

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl. Cetak 20/02/2018 10:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	2,701,722,260	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	6,784,330	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,009,610,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	25,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	85,139,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	18,827,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	139,839,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	9,341,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	18,036,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	43,564,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	157,872,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	19,790,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	1,149,540,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	1,178,901,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,469,110,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	27,440,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	197,460,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	39,090,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	584,132,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	383,800,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	683,548,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	473,000,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	78,000,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	106,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	2,545,900,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	673,300,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	100,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	518,290,000
2.0	523136	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	10,000,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	1,662,002,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	233,800,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	328,700,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,431,298,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	350,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	248,800,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	49,000,000
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3,800,000
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,984,330

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 677382

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl. Cetak 20/02/2018 10:17 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	787,962,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,387	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,602,540	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,001,324	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	67,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,450,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,129,890	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	35,775,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	84,714,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	17,440,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,142,490,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,036,950,122	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	67,533,225
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,201,381,770	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,623,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	182,920,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,190,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	467,038,950	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	321,750,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	446,159,800	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	461,279,800	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	56,103,585	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70,201,595	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,463,096,970	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	403,250,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	99,950,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224,545,447	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	9,560,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,468,409,346	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140,910,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231,920,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,246,979,266	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	303,303,068	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247,226,025	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	47,500,000	0
JUMLAH			18,097,471,555	18,097,471,555

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 059
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT 677382

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 21/02/18 10:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	6,784,330	(6,784,330)	0	0	5,617,867	(5,617,867)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	6,784,330	(6,784,330)	0	0	5,617,867	(5,617,867)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	3,830,484,000	3,192,133,118	638,350,882	83	3,545,440,000	3,187,400,976	358,039,024	90
	BELANJA BARANG	13,894,870,000	11,834,572,597	2,060,297,403	85	18,174,799,000	12,980,413,566	5,194,385,434	71
	BELANJA MODAL	297,800,000	294,726,025	3,073,975	99	103,000,000	79,228,941	23,771,059	77
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	18,023,154,000	15,321,431,740	2,701,722,260	85	21,823,239,000	16,247,043,483	5,576,195,517	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KP
SATUAN KERJA : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 21/02/18 10:18 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,304,939,462	2,359,365,235	(1,054,425,773)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15,452,613,793)	(17,237,216,371)	1,784,602,578	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,643,000)	(58,635,018)	55,992,018	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(60,234,018)	60,234,018	-
LAIN-LAIN	(2,643,000)	1,599,000	(4,242,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	15,314,647,410	16,241,425,616	(926,778,206)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(140,609,383)	(1,054,425,773)	913,816,390	-
EKUITAS AKHIR	1,164,330,079	1,304,939,462	(140,609,383)	-

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 KDUAPPAW : 059010100KP null
 KODE SATKER : 677382 SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Tgl. Cetak 21/02/2018 10:20 AM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,545,228	2,643,000	(1,097,772)	(41.54)
Persediaan	143,005,555	78,746,373	64,259,182	81.60
JUMLAH ASET LANCAR	144,550,783	81,389,373	63,161,410	77.60
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	5,571,654,036	4,225,156,261	1,346,497,775	31.87
Aset Tetap Lainnya	248,112,400	248,112,400	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,866,675,381)	(3,433,404,705)	(1,433,270,676)	41.74
JUMLAH ASET TETAP	953,091,055	1,039,863,956	(86,772,901)	(8.34)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	197,150,000	149,650,000	47,500,000	31.74
Aset Lain-lain	0	1,471,469,250	(1,471,469,250)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(130,218,750)	(1,279,652,375)	1,149,433,625	(89.82)
JUMLAH ASET LAINNYA	66,931,250	341,466,875	(274,535,625)	(80.40)
JUMLAH ASET	1,164,573,088	1,462,720,204	(298,147,116)	(20.38)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	243,009	157,780,742	(157,537,733)	(99.85)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	243,009	157,780,742	(157,537,733)	(99.85)
JUMLAH KEWAJIBAN	243,009	157,780,742	(157,537,733)	(99.85)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,164,330,079	1,304,939,462	(140,609,383)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	1,164,330,079	1,304,939,462	(140,609,383)	(10.78)
JUMLAH EKUITAS	1,164,330,079	1,304,939,462	(140,609,383)	(10.78)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,164,573,088	1,462,720,204	(298,147,116)	(20.38)